

RUANG PUBLIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH Studi Terhadap Pemilihan Walikota Bandung Tahun 2003

Caroline Paskarina*

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran Bandung dan
Staf Peneliti Puslit Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Lemlit Unpad
Jl. Cisangkuy No. 62 Bandung

ABSTRAK. Desentralisasi dan demokratisasi dalam era reformasi telah mengubah proses pemilihan kepala daerah menjadi peristiwa politik yang menarik dan sulit untuk diprediksi. Dalam proses tersebut, terdapat berbagai kepentingan yang bertarung dengan menggunakan bermacam-macam strategi, termasuk melalui penggunaan bahasa dalam pertarungan wacana. Analisis terhadap pertarungan wacana dilakukan dengan menggunakan metode analisis wacana (*discourse analysis*). Indikator yang digunakan meliputi *setting, agents atau participants, political actions, dan mutual knowledge (basis kognisi)* yang membentuk pemaknaan dari wacana-wacana yang saling berkompetisi. Pemaknaan terhadap wacana yang muncul, baik wacana utama maupun wacana tandingan dianalisis dengan mengacu pada konteks sosial. Selanjutnya, ketersediaan ruang publik sebagai arena berlangsungnya kompetisi wacana dapat diukur dari penggunaan dimensi-dimensi kekuasaan, kapital, dan kebudayaan dalam proses produksi dan reproduksi makna dari suatu wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi makna masih didominasi oleh elit. Dominasi ini diindikasikan dari penggunaan argumen-argumen yang bersifat legal, normatif, dan prosedural sehingga mempersempit peluang munculnya wacana tandingan. Wacana figur alternatif sebagai wacana tandingan mengindikasikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap elit penguasa yang dinilai tidak mampu membawa perubahan signifikan dalam praktik pemerintahan daerah. Dari ketiga dimensi yang diteliti, dimensi kapital berpotensi besar untuk memperluas ruang publik meskipun perannya dalam memunculkan wacana tandingan tidak terlepas dari kepentingan akumulasi modal sehingga perlu diimbangi dengan pengembangan kapasitas dua dimensi lainnya.

Kata kunci: ruang publik, pertarungan wacana, pemilihan walikota

ABSTRACT. Decentralization and democratization within reformation era have turned the mayor election into interesting and unpredictable political event. There are varieties of interests fighting in local government election using any kind of strategies, including language through discourse. Discourse contestation is analysed with discourse analysis method. The indicators are setting, agents or participants, political actions, and mutual knowledge that construct the meaning of discourse. The interpretation of discourse meaning, both main discourse and counterdiscourse, is related to social context. The existence of public sphere as

space for discourse contestation is measured by the emerged of counter discourse through the exercised of power, capital, and cultural dimensions. The result shows that construction of meaning is still dominated by elites. This domination indicates through the use of legal, normative, procedural arguments. Issue of alternative figures as counterdiscourse indicates the decrease of public legitimation and trust to governing elites considered unable to bring significant changes in local government practice. Among three dimensions, capital dimension has potency to increase public sphere through articles and news in mass media. However, the capital orientation of this dimension needs to be balanced by developing the capacity of two other dimensions.

Key words : public sphere, discourse contestation, mayor election

PENGANTAR

Pergantian kekuasaan di Indonesia memberi peluang bagi menguatnya arus demokratisasi dalam praktik pemerintahan. Dalam tataran lokal, arus demokratisasi ini direpson dengan menguatnya tuntutan desentralisasi dalam format hubungan pusat dan daerah. Selama lebih dari tiga dekade, penyelenggaraan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan daerah berlangsung secara sentralistis, di mana pemerintah pusat berperan dominan dalam menentukan hubungan kewenangan, hubungan keuangan, termasuk pula dalam menentukan kepala daerah yang akan memimpin daerah otonom. Desentralisasi membuka peluang terjadinya peralihan lokus kekuasaan ke daerah melalui pemberian kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Implikasi politiknya, penyebaran kekuasaan ke daerah membuka ruang politik lokal semakin luas, antara lain dalam hal kewenangan dalam memilih para pejabat politik yang akan mengisi parlemen daerah atau menjadi kepala daerah. Semangat desentralisasi dan demokratisasi dalam arus reformasi menjadikan pemilihan kepala daerah sebagai proses politik yang menarik dan penuh dengan kejutan.

Proses pemilihan kepala daerah sebagai salahsatu bentuk suksesi politik seringkali dipandang sebagai proses yang elitis tanpa membuka ruang bagi partisipasi publik yang lebih substantif. Pandangan ini tampaknya masih belum berubah sekalipun sistem dan mekanisme pemilihannya telah berganti, dari sistem perwakilan menjadi pemilihan langsung. Dalam sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang sekarang diterapkan, peluang partisipasi rakyat memang lebih besar karena dapat memilih siapa yang akan menjadi kepala daerah, namun partisipasi rakyat masih terbatas pada memilih di antara calon-calon yang diajukan partai politik. Rakyat belum memiliki peluang untuk menentukan calon-calon yang akan diajukan tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pemilihan kepala daerah sebenarnya masih berlangsung secara elitis karena peran elit politik masih sangat menentukan apakah seseorang terpilih sebagai calon kepala daerah atau tidak.

Sehubungan dengan itu, konsep demokrasi deliberatif menawarkan perspektif alternatif, bahwa partisipasi publik juga dapat dilakukan melalui pertarungan wacana dalam ruang publik. Habermas mendefinisikan ruang publik (*public sphere*) sebagai:

a communication structure rooted in the lifeworld through the associational network of civil society. It is a space where citizens can get together freely and have open political conversations, deliberate about their political interests and attempt to determine what actions to take to arrive at the common good (Habermas, 1996:359).

Ruang publik memungkinkan seluruh warga masyarakat berpartisipasi dalam diskusi dan debat mengenai visi, misi, latar belakang, program kerja, dan kapabilitas figur-figur yang dicalonkan. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji mengenai bagaimana ketersediaan ruang publik dalam pemilihan Walikota Bandung, serta sejauhmana ruang publik yang tersedia mampu memunculkan wacana tandingan (*counter discourse*) melalui penggunaan sejumlah strategi, seperti strategi kekuasaan, kapital, dan kebudayaan.

Isu ruang publik dalam pemilihan Walikota Bandung tahun 2003 memperoleh relevansinya ketika berhadapan dengan fenomena yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pemilihan walikota berlangsung. Secara teknis, pemilihan Walikota Bandung dimulai pada awal Mei 2003 yang diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan dan penetapan Tata Tertib Pemilihan. Proses selanjutnya adalah pendaftaran bakal calon di Gedung DPRD Kota Bandung. Proses politik formal ini seolah menjadi tidak penting lagi karena sejak sebelum dibentuknya Panitia Pemilihan, sudah terjadi polarisasi kekuatan di antara dua nama yang menjadi calon kuat bagi jabatan walikota, yakni Aa Tarmana (yang masih menjabat sebagai Walikota Bandung) dan Dada Rosada (mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung). Polarisasi ini menyebabkan opini publik telah terbentuk sejak awal bahwa calon kuat yang akan memenangkan pemilihan walikota adalah Aa Tarmana atau Dada Rosada, padahal proses pemilihan baru sampai tahap pendaftaran bakal calon, sehingga masih dimungkinkan munculnya calon-calon lain di luar keduanya.

Persaingan antara Aa Tarmana dan Dada Rosada yang dimulai sejak Dada Rosada masih menjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung kemudian mencapai puncaknya ketika Walikota Bandung Aa Tarmana (melalui Keputusan Walikota No. 824/Kep.1506.Bag.Peg/2002 tanggal 25 Oktober 2002) memberhentikan Sekretaris Daerah Kota, Dada Rosada, dengan alasan dugaan akan mencalonkan diri sebagai Walikota (Pikiran Rakyat, 4 November 2002). Langkah tersebut dilanjutkan dengan mutasi 137 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung ke bagian lain agar tidak ikut bermain politik dalam proses pemilihan Walikota (Kompas, 5 Februari 2003).

Polarisasi di antara kedua calon tersebut mempersempit ruang publik yang tersedia karena figur alternatif menjadi sulit untuk muncul. Meskipun proses

formal belum berlangsung, pemberitaan di media massa telah mengarah pada terbentuknya opini publik yang berfokus pada kedua calon tersebut. Opini publik ini kemudian akan membentuk basis kognisi dari anggota DPRD sebagai pengambil keputusan sehingga jika sejak awal opini publik telah terfokus pada kedua figur tersebut, maka peluang bagi munculnya figur lain akan menjadi terbatas sehingga pada akhirnya kompetisi politik yang berlangsung menjadi tidak seimbang. Atas dasar asumsi inilah, maka penelitian mengenai ketersediaan ruang publik dalam menjembatani wacana yang berkembang di masyarakat dengan pengambilan keputusan oleh DPRD menjadi relevan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang secara operasional dilakukan melalui analisis wacana (*discourse analysis*) yang merupakan jenis penelitian yang berfokus pada analisis struktur, strategi, dan proses produksi dan reproduksi makna *texts dan talks yang dilakukan secara eksplisit dan sistematis*, sebagaimana dikatakan Van Dijk, *discourse analysis is an explicit, systematic account of structures, strategies or processes of texts and talks in terms of theoretical notions developed in any branch of the field* (van Dijk, 2000). Jadi, unit analisis yang diteliti dalam *discourse analysis* adalah *texts dan talks*. Selanjutnya Van Dijk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *texts dan talks* adalah *structures of expression (sounds, image, movement, etc., including those of words, word order or sentence structure), on the one hand, and structures of meaning and (inter)action, on the other* (van Dijk, 2000). *Texts* berkaitan dengan struktur ekspresi dalam bentuk kata, susunan kata, atau susunan kalimat, sementara *talks* merupakan struktur ekspresi dalam bentuk audio (suara, ucapan, dan sebagainya). Akan tetapi, *texts dan talks* tidak hanya dianalisis dari aspek strukturnya (bentuknya) tetapi juga dianalisis proses dan konteks yang melatarbelakangi produksi dan reproduksi keduanya.

Instrumen pengumpulan data primer diperoleh melalui observasi partisipatif (*participant observation*) dalam forum-forum debat publik, diskusi, dan seminar-seminar yang diselenggarakan oleh berbagai kelompok masyarakat dan debat publik yang diselenggarakan oleh DPRD. Selain itu, data primer juga diperoleh langsung dari informan (narasumber) melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan DPRD Kota Bandung (4 orang), Ketua-ketua fraksi di DPRD Kota Bandung (8 orang, berasal dari F-PDIP, F-PAN, F-GOLKAR, F-KBB, F-PPP, F-PKB, F-PKP, F-TNI/POLRI), Tim Asistensi DPRD Kota Bandung (2 orang), Tim Independen (5 orang), serta aktivis sejumlah LSM yang menyelenggarakan forum debat publik dan melakukan pemantauan terhadap proses pemilihan Walikota Bandung, seperti Bandung Institute for Governance Studies (BIGS), Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB), dan Radio Mara untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai *setting politik lokal dan konteks sosial-politik yang melatarbelakangi produksi dan reproduksi wacana, termasuk informasi dan konfirmasi mengenai peran aktor-*

aktor yang terlibat. Informasi yang diperoleh akan diolah untuk melengkapi analisis terutama dalam menginterpretasikan dan menjelaskan makna yang tersembunyi (*hidden transcript*) dari *texts* dan *talks*.

Dalam menentukan informan yang dilakukan bersama-sama dengan wawancara di lapangan digunakan teknik *snowball* yakni dengan *pertama-tama* menghubungi narasumber yang dianggap sebagai *key person*. Alasannya *key person* lebih memahami *setting politik lokal*, dapat menjadi sumber informasi bagi pencarian informan selanjutnya sampai diperoleh data yang lengkap dan komprehensif (Nasution, 1992: 32).

Data berupa *texts* dan *talks* diperoleh melalui *pertama*, dokumentasi dan risalah rapat-rapat DPRD Kota Bandung. Kedua, dokumentasi hasil debat publik dalam forum-forum yang dilaksanakan LSM. Ketiga, analisis berita Harian Umum Pikiran Rakyat dan Metro Bandung. Kedua harian ini dipilih dengan alasan daya jangkauannya yang cukup luas, segmentasi pembaca yang relatif beragam, dan perbedaan pemilik, sehingga diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menganalisis wacana. HU Pikiran Rakyat dimiliki dan dikelola oleh Grup Pikiran Rakyat dan merupakan surat kabar lokal yang terkemuka di Kota Bandung. Sementara Metro Bandung dimiliki dan dikelola oleh Grup Kompas.

Teknik analisis data yang digunakan adalah semiotika yakni teknik analisis dalam melihat *texts* dan *talks* sebagai tanda (*simbol*) yang dapat dieksplorasi maknanya, cara berfungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengiriman, dan penerimaannya (Sudjiman dan van Zoest, 1992: 5). Analisis dilakukan terhadap aspek-aspek :

1. Tematik (topik), berkaitan dengan tema/topik yang dikedepankan dalam *text* dan *talks*.
2. Skematik, berkaitan dengan bagaimana bagian dan urutan *texts* dan *talks* diskemakan secara utuh.
3. Semantik, berkaitan dengan makna yang ingin ditekankan dalam *text* dan *talks* (*latar, detil, maksud, dan lain-lain*).
4. Sintaksis, berkaitan dengan bagaimana kalimat (bentuk dan susunan) yang digunakan (bentuk kalimat, koherensi, kata ganti).
5. Stilistik, berkaitan dengan bagaimana pilihan kata yang dipakai (leksikon).
6. Retorik, berkaitan dengan bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan (*grafis, metafora, ekspresi*).

Data dalam bentuk *texts* dan *talks* dianalisis dari perspektif semiotika dan dilengkapi dengan analisis konteks berlangsungnya pertarungan wacana, yang meliputi *setting, participants, political actions, dan mutual knowledge* sehingga hasil analisis mampu menjelaskan mengenai ketersediaan ruang publik, baik dalam dimensi kekuasaan, kapital, dan kebudayaan.

RUANG PUBLIK SEBAGAI ARENA PERTARUNGAN WACANA

Demokrasi deliberatif mendasarkan asumsinya pada tindakan komunikatif dalam bentuk pertarungan wacana. Pemilihan kepala daerah dimaknai sebagai ruang bagi masyarakat untuk menguji secara kritis argumen-argumen yang disampaikan oleh para aktor yang terlibat dalam proses pemilihan. Arena tempat berlangsungnya pertarungan wacana inilah yang disebut dengan ruang publik. Oleh karena itu, dalam konsepsi ini, ruang publik tidak diartikan secara fisik tetapi merupakan ruang sosial (*social space*) yang dihasilkan oleh tindakan komunikatif. Ruang publik menjadi tempat bagi terbentuknya opini publik yang merefleksikan isu-isu yang berkembang dalam tataran elit maupun massa (Dryzek, 2000: 24). Pembentukan opini publik melalui debat publik akan memiliki kekuatan komunikatif (*communicative power*) untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang secara formal dilakukan melalui mekanisme perwakilan.

Kemampuan mempengaruhi tersebut dilakukan melalui opini publik yang terbentuk dari diskursus publik. Dengan demikian, kekuatan pengaruh dari deliberasi yang berlangsung dalam ruang publik terletak pada bagaimana isu-isu dibentuk, didefinisikan, dan dipublikasikan, yang artinya merupakan bagian dari proses kontestasi diskursus dalam debat publik. Dalam proses ini, masing-masing pihak saling bertukar argumen rasional untuk mempengaruhi pihak lain sehingga preferensi seseorang terhadap suatu isu dapat diubah sampai akhirnya terbentuk kesepakatan atau konsensus.

Pada hakikatnya, pembentukan ruang publik dapat dilihat dari munculnya wacana alternatif yang mampu menandingi wacana utama (*main discourse*). Relasi kekuasaan yang dominatif terefleksikan dalam produksi dan reproduksi kuasa yang masuk dalam ruang kultural, yakni tempat wawasan dan makna dikomunikasikan dalam berbagai wacana yang saling berkompetisi. Wacana tandingan merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi penguasa yang dipertahankan melalui struktur teks, pilihan kosakata, dan gramatika yang membentuk pemaknaan terhadap suatu realitas politik.

Untuk mengukur ketersediaan ruang publik, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap pertarungan wacana yang berlangsung dalam ruang publik untuk memperoleh gambaran bagaimana suatu wacana tandingan (*counter discourse*) dibuat dan ditampilkan. Analisis wacana (*discourse analysis*) merupakan jenis penelitian yang berfokus pada analisis struktur, strategi, dan proses produksi dan reproduksi makna *texts dan talks yang dilakukan secara eksplisit dan sistematis. Texts berkaitan dengan struktur ekspresi dalam bentuk kata, susunan kata, atau susunan kalimat, sementara talks merupakan struktur ekspresi dalam bentuk audio (suara, ucapan, dan sebagainya). Akan tetapi, texts dan talks tidak hanya dianalisis dari aspek strukturnya (bentuknya) melalui perspektif semiotika, tetapi juga dianalisis dari proses dan konteks yang melatarbelakangi produksi dan reproduksi keduanya (van Dijk, 2000; Sudjiman dan van Zoest, 1992).*

Indikator untuk menganalisis pertarungan wacana meliputi *setting, agents* atau *participants, political actions, dan mutual knowledge (basis kognisi)* yang membentuk pemaknaan dari wacana-wacana yang saling berkompetisi. Pemaknaan terhadap wacana yang muncul, baik wacana utama maupun wacana tandingan dianalisis dengan mengacu pada konteksnya, yakni konteks sosial, yakni bagaimana produksi dan reproduksi wacana tentang pemilihan kepala daerah dihubungkan dengan struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat lokal, termasuk juga dengan aspek-aspek budaya politik lokal, seperti praktik kekuasaan, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan setempat.

Selanjutnya, setelah mengetahui konteks pertarungan wacana maka ketersediaan ruang publik sebagai arena berlangsungnya kompetisi wacana dapat diukur dari penggunaan dimensi-dimensi kekuasaan, kapital, dan kebudayaan dalam proses produksi dan reproduksi makna dari suatu wacana. Pada akhirnya, efek dari opini yang terbentuk melalui pertarungan wacana dalam ruang publik akan diukur dari sejauhmana dimensi kekuasaan, kapital, dan kebudayaan dapat digunakan oleh para aktor pendukung wacana utama maupun wacana tandingan untuk saling menguji argumentasinya masing-masing.

PEMBENTUKAN RUANG PUBLIK

Pembedaan antara wacana utama maupun wacana tandingan tidak didasarkan pada lokus asal wacana maupun aktor yang mengemukakan wacana tersebut, tetapi dilihat dari pilihan kosakata yang digunakan, gramatika, dan struktur teks yang menjelaskan inti argumentasi yang dikemukakan selama pertarungan wacana (Santoso, 2003: 44).

Sepanjang berlangsungnya proses pemilihan walikota, berkembang dua kelompok wacana, yakni wacana demokratisasi prosedural pemilihan walikota sebagai wacana utama (*main discourse*) dan figur alternatif sebagai wacana tandingan (*counter discourse*). Dalam kedua kelompok wacana ini, berkembang pula wacana-wacana lain yang digunakan sebagai dasar argumen bagi para pendukung wacana utama maupun wacana tandingan.

Wacana utama dalam prosesi pemilihan Walikota Bandung periode 2003 – 2008 ini didominasi oleh *political will DPRD untuk menyelenggarakan proses* pemilihan yang lebih demokratis dibandingkan pemilihan sebelumnya. Wacana utama didukung oleh isu-isu dan pemberitaan yang menunjukkan penilaian demokrasi secara prosedural-administratif, antara lain dengan membentuk Tim Independen dan menyelenggarakan dialog publik. Proses pemilihan walikota yang demokratis dimaknai sebagai berlangsungnya keseluruhan tahapan legal-administratif sesuai dengan mekanisme dan tata tertib yang telah ditetapkan.

Argumen dan pemaknaan yang berkembang sebagai pendukung wacana utama adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Argumen dan Pemaknaan dalam Wacana Utama

Argumen	Pemaknaan
Perluasan partisipasi publik dengan membuka jaringan telepon bagi masyarakat serta mengundang perwakilan masyarakat untuk memberikan masukan bagi rancangan materi Tatib Pemilihan	Adanya <i>political will</i> DPRD untuk memberi ruang yang lebih luas bagi masuknya aspirasi rakyat dalam pengambilan keputusan
Pembentukan Tim Independen	Transparansi dan obyektivitas dalam seleksi pasangan calon
Pencalonan figur alternatif oleh Fraksi Keadilan Bulan Bintang (FKBB)	Keberpihakan FKBB (sebagai bagian dari elit legislatif) terhadap aspirasi publik yang menginginkan perubahan
Penyelenggaraan dialog public	Penciptaan ruang publik sehingga masyarakat dapat mengakses informasi
Netralitas Fraksi TNI/Polri	kapabilitas figur-figur bakal calon
Karantina anggota DPRD menjelang pemungutan suara	Pengurangan peran politik militer dalam penentuan jabatan politik di daerah
	Pencitraan terhadap proses pemilihan walikota yang demokratis, stabil, dan memperkecil peluang terjadinya <i>money politics dan intimidasi</i>

Sumber : Hasil penelitian diolah, Januari 2004

Wacana utama pada kenyataannya lebih mengarah pada upaya melegitimasi proses yang berlangsung. Hal ini diindikasikan dari argumen-argumen dan strategi yang terungkap sebagai pendukung wacana utama. Wacana tandingan (*counter discourse*) justru menilai bahwa proses pemilihan walikota semata-mata adalah proses yang elitis dan "mengambang" karena tidak berakar di level *grass root*. Sejumlah argumen yang menjadi pendukung bagi berkembangnya wacana tandingan menunjukkan masih banyaknya celah yang memungkinkan proses pemilihan didominasi oleh sekelompok elit, baik elit partai politik maupun elit-elit birokrasi yang menduduki jabatan-jabatan struktural. Hal ini tercermin dalam argumen dan pemaknaan yang mendukung wacana tandingan sebagaimana dimuat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. Argumen dan Pemaknaan dalam Wacana Tandingan

Argumen	Pemaknaan
Tim Independen hanyalah ornamen demokrasi semu	Keraguan terhadap peran Tim Independen sebagai akibat dari keterbatasan kewenangan dan proses rekrutmen anggota tim yang tidak transparan
Egoisme partai	Partai masih sangat dominan dalam mengintervensi keputusan fraksi melalui mekanisme <i>recall</i>
Polarisasi birokrasi	Birokrasi masih menjadi mesin politik yang cukup berpengaruh untuk menggalang dukungan
Figur alternative	Krisis kepercayaan masyarakat terhadap figur-figur elit penguasa yang konservatif terhadap tuntutan perubahan dan dinilai tidak mampu melahirkan kebijakan progresif untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat
Pengerahan massa	Pentingnya dukungan dalam jumlah (kuantitas) yang besar sebagai bukti akseptabilitas dan legitimasi politik seorang calon
Proses pemilihan yang elitis	Kecenderungan memperjuangkan legitimasi dan dukungan secara vertikal dari pimpinan pusat partai dibandingkan mensosialisasikan visi, misi, dan program kepada masyarakat sebagai akibat dari sistem pemilihan perwakilan yang menempatkan masyarakat bukan sebagai pengambil keputusan akhir

Sumber : Hasil penelitian diolah, Januari 2004

Kemunculan wacana tandingan mengindikasikan terbentuknya ruang publik sebagai produk dari tindakan komunikatif. Argumen-argumen pendukung wacana tandingan merupakan respon terhadap klaim validitas wacana utama yang terfokus pada aspek prosedural. Padahal secara substantif, proses pemilihan masih didominasi oleh elit penguasa termasuk dalam menentukan pemaknaan sebagai dasar justifikasi dan legitimasi bagi figur yang terpilih. Argumen inilah yang mendasari berkembangnya wacana figur alternatif yang dianggap mampu membawa pembaharuan dalam praktik pemerintahan. Para pendukung wacana tandingan tidak mempersoalkan jika figur alternatif tersebut juga berasal dari elit,

tetapi bukan elit penguasa. Pergantian figur walikota dianggap menjadi langkah awal bagi pembaharuan manajemen pemerintahan.

DIMENSI-DIMENSI RUANG PUBLIK

Ketersediaan ruang publik yang relatif lebih luas menjadi kurang efektif untuk mendorong terjadinya perubahan substantif dalam proses pemilihan walikota karena ketersediaan ruang-ruang bagi munculnya wacana alternatif tidak didukung oleh tersedianya gerakan kolektif yang terorganisasikan serta mampu berperan untuk mengadvokasi aspirasi yang berkembang di luar Gedung DPRD. Aspirasi yang berkembang di luar lingkungan DPRD muncul sebagai wacana yang parsial dan tidak memiliki benang merah antara wacana yang satu dengan wacana lainnya. Tidak ada agenda bersama (*common agenda*) yang disepakati oleh kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan sehingga wacana tandingan yang dimunculkan terkesan parsial.

Sekalipun wacana figur alternatif menjadi wacana tandingan yang mendominasi keseluruhan periode pertarungan wacana, namun wacana ini tidak cukup ditopang oleh penggunaan dimensi kekuasaan, kapital, maupun kultural yang terencana sehingga kesan yang timbul adalah wacana figur alternatif tersebut merupakan alat politik bagi kelompok-kelompok yang kontra terhadap figur-figur kandidat yang termasuk dalam elit penguasa. Substansi permasalahan yang menjadi konteks lahirnya wacana figur alternatif, yakni krisis kepercayaan masyarakat terhadap figur-figur elit penguasa akibat praktik politik yang pragmatis, justru tidak muncul sebagai argumentasi utama dalam wacana tandingan. Di sisi lain, posisi tawar (*bargaining position*) dari para pendukung wacana alternatif ini tidak cukup kuat karena tidak didukung oleh kekuatan riil politik.

Dimensi kekuasaan relatif sulit untuk memunculkan wacana tandingan karena struktur dan relasi kekuasaan yang mapan sehingga perubahan dalam dimensi kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh para aktor yang berada dalam lingkaran pusat kekuasaan (elit penguasa). Perlawanan terhadap dominasi elit partai politik misalnya, lebih bersifat terselubung dalam bentuk pembelotan suara sehingga suara yang diperoleh pasangan calon berbeda dengan jumlah anggota fraksi yang mengajukannya. Perilaku ini mengindikasikan adanya perlawanan dari anggota fraksi yang tidak menyetujui keputusan partai. Cara ini dipilih karena risikonya relatif kecil karena tidak mudah untuk menemukan siapa anggota fraksi yang membelot meskipun telah ada penggunaan simbol-simbol tertentu dalam penulisan nama pasangan calon untuk mengontrol pilihan anggota.

Dimensi kebudayaan memiliki kelemahan dalam memunculkan ruang publik yang lebih luas karena menggunakan model komunikasi simbolis yang multiinterpretatif sehingga pesan yang ingin disampaikan sulit untuk dipahami oleh pihak yang dikritik. Konteks budaya Sunda juga cenderung memunculkan perilaku *abdikrat*, *altruistik*, dan *sineger tengah* untuk menghindari konflik dan memelihara keseimbangan yang harmonis. Penggunaan simbol-simbol

kebudayaan untuk memunculkan kritik terhadap elitisme proses pemilihan walikota diperagakan oleh salah seorang bakal calon walikota (Taufik Mulyawan) melalui pertunjukkan *happening art di halaman depan Gedung DPRD Kota Bandung*. Pertunjukkan ini dilakukan sebelum ia mengembalikan formulir pendaftaran pada Panitia Pemilihan. Taufik Mulyawan dan juru bicaranya datang ke Gedung DPRD dengan menunggang kuda sewaan kemudian membakar kemenyan, mandi kembang, dan pada saat akan masuk ke Gedung DPRD membacakan doa masuk ke WC. Perilaku ini merupakan simbol kritik terhadap proses pemilihan yang terpusat pada sekelompok anggota DPRD padahal figur-figur anggota DPRD sedang mengalami krisis kepercayaan di mata publik.

Atraksi tersebut menunjukkan bahwa wacana tandingan yang menginginkan demokratisasi substansi proses pemilihan sesungguhnya juga telah masuk ke dalam *setting pengambil keputusan, namun tidak mendapatkan tanggapan* dari para pengambil keputusan sehingga kritik yang disampaikan tidak cukup efektif untuk mendorong terjadinya perubahan.

Dimensi kapital berpeluang untuk membuka ruang publik yang lebih besar, meskipun wacana tandingan yang dimunculkan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan akumulasi modal sehingga perlu diimbangi dengan pengembangan kapasitas dua dimensi lainnya. Peran media massa, kalangan akademisi, dan LSM tidak ditempatkan sebagai penyedia kebenaran tapi lebih sebagai agen konstruksi pesan. Pesan dibentuk secara bersama-sama antara pihak-pihak yang berkomunikasi serta dihubungkan dengan konteks sosial sehingga masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam menginterpretasikan suatu pesan.

Penerimaan terhadap hasil pemilihan walikota tanggal 9 September 2003 merupakan bentuk konsensus yang telah dapat diperkirakan sebelumnya karena sepanjang proses pemilihan, tidak muncul sikap oposisi yang riil. Namun konsensus ini tidak diartikan sebagai kesepakatan semua pihak secara bulat terhadap hasil pemilihan tapi lebih pada kesepakatan atas dasar argumentasi yang paling rasional. Argumentasi yang paling rasional sebagai dasar konsensus penerimaan hasil pemilihan tersebut bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mayoritas wakil rakyat yang duduk di parlemen dan bahwa terpilihnya pasangan tersebut bukanlah akhir dari demokratisasi karena masyarakat nantinya dapat menilai kinerja kepemimpinan walikota dan wakil walikota terpilih tersebut. Dengan demikian, konsensus ini mengandung pertimbangan yang berorientasi ke masa depan, bahwa lebih baik berkonsentrasi untuk mengawasi, menilai, dan mengkritisi kinerja pasangan tersebut dibandingkan mempersoalkan keputusan yang secara prosedural telah sah.

PENUTUP

Analisis terhadap ruang publik dalam pemilihan Walikota Bandung menunjukkan adanya kecenderungan delegitimasi terhadap figur-figur elit penguasa yang tidak hanya terjadi di level massa, tapi juga di sebagian elit strategis, antara lain di kalangan pelaku media, akademisi, dan LSM. Salah satu

fenomena yang menarik adalah berkembangnya kecenderungan di kalangan pelaku media untuk memunculkan pelontar wacana tandingan yang tidak berasal dari dalam lingkungan elit penguasa. Langkah ini menjadi salah satu strategi untuk meruntuhkan hegemoni pendukung wacana utama yang umumnya berasal dari figur-figur pelaku dan pengamat politik yang telah mapan (dalam arti telah masuk dalam lingkaran elit penguasa atau berada di dekat elit penguasa sebagai penasehat/staf ahli).

Strategi ini juga dimaksudkan untuk memunculkan wacana alternatif yang dapat mengatasi kejenuhan masyarakat akan berita-berita politik dari perspektif yang sama sehingga proses deliberasi tidak terjebak dalam alur pertarungan argumentasi yang monoton. Dengan demikian, media tidak berperan netral dalam proses deliberasi, namun berperan sesuai dengan kepentingannya untuk memunculkan wacana-wacana alternatif, baik dalam kerangka memberikan pencerahan/pendidikan politik publik maupun untuk kepentingan komersial (nilai jual berita yang ditulis).

Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang masih terdapat dalam proses deliberasi selama pemilihan walikota Bandung, kemunculan ruang publik yang difasilitasi oleh media massa, akademisi, dan LSM membawa dampak positif bagi pembelajaran politik publik. Berbeda dengan proses politik semasa Orde Baru yang serba tertutup, proses politik pada masa reformasi membuka celah bagi masyarakat untuk "mengintip" pertarungan kepentingan di balik gedung DPRD. Masyarakat dapat belajar untuk memilih alternatif informasi yang paling diyakininya tanpa harus dipaksa meyakini kebenaran pemberitaan yang berasal dari satu sumber atau satu perspektif karena bagaimanapun, wacana-wacana yang berkembang sesungguhnya tidak menyediakan kebenaran melainkan konstruksi makna yang dapat diuji validitas klaimnya oleh siapa pun.

Dalam konteks kekinian di mana pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, analisis mengenai keberadaan ruang publik masih tetap relevan. Mekanisme langsung yang diyakini dapat memperluas ruang partisipasi publik pada kenyataannya tidak menunjukkan partisipasi publik yang lebih signifikan dalam menentukan para pemimpin politiknya. Dari segi prosedur, pilkada langsung dilakukan secara seragam di daerah-daerah, padahal masing-masing daerah memiliki kekhususan dalam hal dinamika proses, karakter pemilih dan cara penyelesaian masalah. Dalam kaitan ini, cara-cara menggalang dukungan juga berbeda-beda. Meskipun pada akhirnya, dari segi dinamika politik, pilkada langsung relatif masih menghasilkan para pemimpin politik dari latarbelakang birokrat dibandingkan dengan latar belakang lainnya. Politisi menjadi kepala daerah juga bukan merupakan hasil sebagian besar pilkada langsung karena hampir 80% yang terpilih adalah mereka yang berlatar belakang birokrasi.

Kemenangan kaum birokrat ini mengindikasikan masih dominannya dimensi kekuasaan dan kapital dalam pertarungan kekuasaan. Dimensi kebudayaan kendati menunjukkan kecenderungan menguat, namun penguatan ini belum

sampai pada tahap substansial namun lebih merupakan ekspresi kultural sejumlah kelompok masyarakat yang juga tidak terlepas dari alat untuk mencari dukungan dan simpati bagi para kandidat. Penggunaan dimensi kebudayaan tidak efektif karena pola komunikasi simbolis cenderung multiinterpretatif.

Karakteristik budaya politik di Indonesia yang pada umumnya masih menggambarkan karakteristik hubungan elit dan massa yang patrimonial menyebabkan massa lebih bercitra sebagai *supporters (pendukung)* dibandingkan sebagai *voters (pemilih)* yang mengetahui dan memahami hak dan kewajiban politiknya. Sebagai *supporters, kedekatan emosional sangat tinggi dan massa* siap memberikan dukungan dalam bentuk apapun sebagai cerminan dari keberpihakan terhadap sang calon. Loyalitas yang dibentuk cenderung bersifat sentimental, emosional, irasional yang berfokus pada kecenderungan pengkultusan pada sosok kandidat. Karena itulah, pilihan yang diberikan kepada pasangan kandidat belum tentu merupakan pilihan yang rasional.

Kondisi ini semakin memperlebar peluang pemegang otoritas politik, yakni lembaga eksekutif (birokrasi) dan legislatif untuk mengesampingkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Perilaku politik masyarakat yang cenderung apatis terhadap pilkada langsung yang sekarang ini berlangsung menunjukkan ketiadaan *pressure signifikan secara kolektif dari masyarakat ketika kepentingan* mereka tidak terakomodasi sepenuhnya. Hal tersebut tampak dari analisis terhadap ketersediaan ruang publik dalam pilkada langsung. Kemunculan isu-isu yang menopang wacana tandingan terkesan parsial dan tidak berkesinambungan sehingga tidak cukup kuat untuk membangkitkan efikasi atau minimal kepedulian masyarakat terhadap proses yang berlangsung.

Peran media massa yang diyakini dapat menyediakan ruang informasi yang lebih luas juga belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Pengaruh kapital seringkali menyebabkan media massa menentukan sepihak isu dan figur penyampai wacana yang dipandang dapat meningkatkan daya jual medianya. Kondisi ini perlu diimbangi dengan pendidikan politik (*voters and civic education*) yang lebih luas bagi masyarakat dengan melibatkan pihak-pihak akademisi, lembaga swadaya masyarakat, bahkan juga RT/RW setempat. Melalui pelibatan banyak pihak dalam pilkada langsung, diharapkan perluasan ruang publik dapat benar-benar membawa perubahan signifikan bagi pengakuan hak publik dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya, bukan sekedar memberikan suara tapi menyadari bahwa suara yang diberikan itu bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

Aritonang, Doro. 2004. "Mabuk Kekuasaan". *Artikel dalam BUJET Edisi 02/Th II/Maret*.

Berman, David R. 1975. *State and Local Politics*. Boston : Holbrook Press, Inc.

Bernstein, Richard J. 1978. *The Restructuring of Social and Political Theory*. USA : University of Pennsylvania Press.

Charney, Evan. 1998. "Political Liberalism, Deliberative Democracy and the Public Sphere". *American Political Science Review* Vol. 92 No. 1, March.

Cooke, Maeve. 2000. "Five Arguments for Deliberative Democracy". *Political Studies*, Vol. 48.

Dryzek, John S. 1997. *The Politics of The Earth : Environmental Discourses*. Oxford : Oxford University Press.

_____. 2000. *Deliberative Democracy and Beyond : Liberals, Critics, Contestations*. Oxford : Oxford University Press.

Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana*. Yogyakarta : LkiS.

Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB). 2003. *Berebut Kursi Goyang : Dokumentasi Proses Pemilihan Gubernur Jawa Barat Periode 2003 – 2008*. Bandung : BIGS.

Greiff, Pablo de. 2000. "Deliberative Democracy and Group Representation". *Social Theory and Practice* Vol. 26 No. 3.

Gutmann, Amy dan Dennis Thompson. 1996. *Democracy and Disagreement*. Cambridge : Harvard University Press.

Habermas, Jürgen. 1981. *The Theory of Communicative Action : Reason and the Rationalization of Society* Vol. I Boston : Beacon Press.

_____. 1996. *Between Facts and Norms : Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge : MIT Press.

Hardiman, F. Budi. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif : Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme menurut Jürgen Habermas*. Yogyakarta : Kanisius.

Iskandar, Yosep. 1997. *Sejarah Jawa Barat (Yuganing Rajakawasa)*. Bandung : Geger Sunten.

Kim, Joohan. 1999. "Communication, Reason, and Deliberative Democracy". *Journal of Communication*.

Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim (eds.). 1996. *Bahasa dan Kekuasaan : Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung : Mizan Pustaka.

Lubis, Nina. 2002. *Sejarah dan Budaya Politik*. Bandung : Satya Historika.

Mulyana, Deddy. 2001. *Nuansa-nuansa Komunikasi : Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Palti, Elias Jose. 2001. "Recent Studies on the Emergence of a Public Sphere in Latin America". *Latin American Research Review* Vol. 36 No. 2.

Saefullah, Avip. 2002. "Buah Politik Kebudayaan Bisu Ki Sunda". *Pikiran Rakyat*, 29 Agustus.

- Santoso, Anang. 2003. *Bahasa Politik Pasca-Orde Baru*. Jakarta : Wedatama Widya Sastra.
- Sumardjo, Jakob. 2003. *Simbol-simbol Artefak Budaya Sunda : Tafsir-tafsir Pantun Sunda*. Bandung : Kelir.
- Sudjiman, Panuti dan Aart van Zoest (eds). 1992. *Serba-serbi Semiotika*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Van Dijk, Teun A. 2000. "What Do We Mean by Discourse Analysis ?" Artikel Editorial dalam *Discourse Studies An Interdisciplinary Journal for the Study of Text and Talk Volume 02 Issue 02 - Publication Date: 1 May 2000*. Download dari www.discourse-in-society.org.
- _____. 2001. "Text and Context of Parliamentary Debate". *Artikel Fourth and Final Draft*, 18 September. Download dari www.discourse-in-society.org.
- _____. 2002. "Knowledge in Parliamentary Debates". *Artikel Second Draft*, 19 Agustus. Download dari www.discourse-in-society.org.
- _____. 2002. "Political Discourse and Political Cognition". *Artikel*. Download dari www.discourse-in-society.org.
- Van Eemeren, Frans H. 1999. "Strategic Manoeuvring in Argumentative Discourse". *Discourse Studies Vol. 1 (4)*. London : SAGE Publications.
- Willer, David. 2003. "Power-at-a-Distance". *Social Forces, Vol. 81, June*.
- Pikiran Rakyat, 22 Agustus 2002 – 11 September 2003.
- Metro Bandung, 5 Mei 2003 – 11 September 2003.
- Kompas, 5 Februari 2003.
- Buletin Bujet, Edisi 6, Juni 2003. Diterbitkan oleh *Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) dan Civil Society Support & Strengthening Program (CSSP)*.
- Risalah Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung tentang Penetapan Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD Kota Bandung tentang Penetapan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Masa Jabatan 2003 – 2008, tanggal 26 Mei 2003.